

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN DI YAYASAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH ISLAM WIHDATUL UMMAH QURRATA A'YUN BATUSANGKAR

Diatul Fajri¹ Rizal² Nofrivul³
diatulgfajri27@gmail.com, rizal@iainbatusangkar.ac.id*,
nofrivul@iainbatusangkar.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami implementasi dari prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A'yun (YPDI-WU-QA) Batusangkar serta pandangan *Stakeholders* terhadap pengelolaan (YPDI-WU-QA) Batusangkar. Penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A'yun Batusangkar telah melaksanakan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sesuai dengan indikator yang dikembangkan, baik akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Transparansi yang dilakukan oleh rizal@iainbatusangkar.ac.id

Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A'yun Batusangkar belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi. Saat ini, dari 6 (enam) indikator prinsip transparansi terdapat 3 (tiga) indikator prinsip transparansi yang belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A'yun Batusangkar yaitu laporan keuangan yayasan belum pernah dipublikasikan melalui media masa. Belum ada laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya yang dapat diakses oleh umum. Serta belum mempunyai website sendiri. *Stakeholders* percaya bahwa pengurus yang ada di yayasan cukup baik dalam pengelolaan yayasan serta *Stakeholders* percaya memberikan sumbangan dan dana wakaf kepada Yayasan Wihdatul Ummah Qurrata A'yun Batusangkar karena profil pengurus yayasan yang kredibel atau taat melaksanakan perintah Agama Islam.

Keywords: *Accountability, Transparency, Foundation*

*Corresponding Author: rizal@iainbatusangkar.ac.id

PENDAHULUAN

Akuntabilitas berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu "*Accountability*", yang berarti "pertanggungjawaban" (Zulfahmi, Basri, & Darwanis, 2016). Akuntabilitas yayasan adalah kewajiban pengurus yayasan untuk tanggap atas kebutuhan publik saat meminta pertanggungjawaban pengelolaan terhadap yayasan. Oleh karena itu, yayasan harus dapat dan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya.

Perlunya pengelolaan keuangan yayasan menerapkan prinsip akuntabilitas sudah dilakukan penelitian oleh Maries, Herawati dan Sinarwati (2017) dengan hasil bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi yayasan yang baik menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yayasan. Karena akuntabilitas sangat diperlukan untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada suatu organisasi. Akuntabilitas sebuah yayasan merupakan tuntutan sekaligus kebutuhan yang mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Tujuan dari penerapan akuntabilitas publik yaitu, untuk menentukan tujuan organisasi yang tepat, Mengembangkan standar untuk pencapaian tujuan secara ekonomi dan efisien serta memberikan informasi tentang penerapan standar yang sudah diterapkan oleh yayasan. Manfaat dari akuntabilitas yaitu, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi, mendorong

organisasi untuk tanggap dan transparansi, menumbuhkan partisipasi masyarakat, menjadikan organisasi beroperasi secara efektif, efisien dan tanggap terhadap apa yang disampaikan oleh masyarakat, serta meningkatkan penilaian kinerja, menciptakan iklim kerja yang sehat dan kondusif dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Selain akuntabilitas, konsep transparansi juga penting dalam pengelolaan sebuah organisasi nirlaba seperti yayasan untuk memastikan bahwa pengelola atau pengurus yayasan dalam menjalankan tugasnya semata-mata untuk mencapai tujuan yayasan, dan bukan tujuan lain. (Simamora, 2012). Hal ini juga disampaikan oleh (Putri, Andriani dan Mustika, 2016). Transparansi adalah keterbukaan informasi yang berkaitan dengan organisasi, dimana tersedia secara mudah, bebas dan bisa diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Keterbukaan yaitu informasi yang cukup berkaitan dengan kinerja lembaga tersedia dan disajikan dalam bentuk atau media yang mudah dipahami masyarakat. (Benawan, Saerang, & Pontoh, 2018).

Manfaat dari penerapan transparansi oleh sebuah yayasan menurut Adrianto (2007) yaitu pertama mencegah terjadinya korupsi. Kedua lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan. Ketiga meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga. Keempat kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu. Kelima menguatnya kohesi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Keenam menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha.

Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A'yun Batusangkar (YPDIWU-QA) adalah organisasi publik yang bergerak di bidang pendidikan yang terletak di Batusangkar Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Yayasan ini berdiri pada tahun 1992 dengan visi "Membina Generasi Qura'ni". YPDIWU-QA yang menyediakan pelayanan pendidikan yang berdasar pada ajaran Islam mulai dari PAUD/TAAM Qurrata A'yun, TKIT Qurrata A'yu, SDIT Qurrata A'yun, SMPIT Qurrata A'yun. Dimana sumber dananya berasal dari SPP, Wakaf, Infaq dan Sedekah.

Pada tahun 2019 YPDIWU-QA telah menerima bantuan dari pihak lain sebesar ± Rp 1,1 Miliar dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan bahwa ikhtisar laporan tahunan YPDIWU-QA wajib diumumkan dalam surat kabar harian dan wajib di audit oleh akuntan publik sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi, karena yayasan sudah memperoleh bantuan dari pihak lain lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pada bulan Desember 2019 melalui wawancara dengan salah satu donatur yaitu wali murid SDIT-QA, Bapak Nofitriadi yang menyampaikan bahwa selama beliau menjadi wali murid belum ada pengumuman khusus tentang laporan keuangan YPDIWU-QA ini menunjukkan belum memenuhi indikator transparansi dan akuntabilitas serta laporan keuangan yang belum pernah di audit oleh akuntan publik. Walaupun demikian sumbangan dari donatur kepada YPDIWU-QA selalu ada dan meningkat.

Dengan demikian perlu dilakukan penelitian yang lebih dalam terkait "Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A'yun Batusangkar"

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Akuntabilitas

Sukmawati dan Nurfitriani (2019) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang pimpinan suatu unit organisasi atau lembaga kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Menurut Sutedi (2012) *Accountability* atau akuntabilitas yaitu menjelaskan peran dan tanggungjawab, serta mendukung usaha untuk menjamin keseimbangan

kepentingan manajemen dan pemegang saham atau donatur, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris atau dewan pembina.

Akuntabilitas, yaitu bahwa para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. (Jubaedah, Lili, & Faozan, 2008)

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas yayasan adalah kewajiban pengurus yayasan untuk tanggap atas kebutuhan publik saat meminta pertanggungjawaban pengelolaan terhadap yayasan. Oleh karena itu, yayasan harus dapat dan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya.

Ukuran atau Dimensi Tercapainya Akuntabilitas

Dimesi yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik menurut (Mahmudi, 2015) adalah sebagai berikut :

Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law of enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktik dan maladministrasi.

Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas Manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif. Akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau *customer*-nya. Akuntabilitas manajerial merupakan akuntabilitas bawahan kepada atasan dalam suatu organisasi.

Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas Finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar

Terdapat beragam klasifikasi akuntabilitas menurut beberapa ahli yang berbeda. Di dalam penelitian ini penulis mengacu kepada Mahmudi (2015) dimana dimensi pencapaian akuntabilitas yang disampaikan Mahmudi lebih mencakup secara keseluruhan yang disampaikan oleh ahli lainnya serta pernyataan Mahmudi (2015) juga didukung oleh Setia (2016).

Konsep Transparansi

Transparansi memiliki arti keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran (Albugis, 2016). Coryanata (2012) menyampaikan bahwa Transparansi sendiri memiliki arti keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran. menurut Sutedi (2012) Transparency atau transparansi yaitu mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan, yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa transparansi yayasan adalah keterbukaan yang mengandung makna bahwa informasi yang berkaitan dengan yayasan tersedia secara mudah dan bisa diakses oleh publik atau pihak- pihak yang terkait dengan yayasan. Transparansi juga bisa berarti informasi yang berkaitan dengan kinerja lembaga tersedia dan disajikan dalam bentuk media yang mudah dipahami masyarakat. Pada dasarnya, jika suatu organisasi terus menerus belajar bagaimana memperbaiki kinerja organisasinya, maka organisasi tersebut akan tumbuh menjadi organisasi yang sehat dengan kepercayaan publik yang baik.

Transparansi dalam yayasan membantu menciptakan sistem kontrol yang baik karena adanya keterlibatan pihak eksternal disamping pihak internal. Transparansi dapat meminimalisir rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap yayasan.

Indikator Transparansi

Nasim dan Romdhon (2016) menyatakan inti dari transparansi adalah ketersediaan informasi untuk masyarakat umum yang indikatornya adalah sebagai berikut:

Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses. Transparansi akan terwujud apabila stakeholders dapat menerima informasi secara detail dan mudah diakses mengenai pengelolaan entitas sektor publik atau yayasan.

Adanya publikasi melalui media mengenai proses kegiatan dan laporan keuangan. Entitas sektor publik atau yayasan mempublikasikan di media seperti di surat kabar, website, facebook, dan televisi. Tentang semua proses kegiatan dan laporan keuangan entitas sektor publik tersebut.

Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya yang dapat diakses oleh umum. Entitas sektor publik atau yayasan harus menyampaikan secara berkala tentang laporan pendayagunaan sumber daya yang diperoleh kepada stakeholders dengan media yang mudah di akses seperti surat kabar dan media sosial.

Laporan tahunan merupakan laporan yang wajib dibuat oleh suatu entitas sektor publik atau yayasan guna mempertanggungjawabkan pengelolaan yayasan selama satu tahun atau satu periode kepada stakeholders.

Website atau media publikasi organisasi adalah suatu keharusan guna memberikan informasi entitas sektor publik atau yayasan kepada stakeholders. Sehingga informasi mengenai yayasan dapat dipahami dan diakses secara mudah oleh stakeholders.

Pedoman dalam penyebaran informasi harusnya diterapkan oleh entitas sektor publik atau yayasan guna menghindari kesalahan dalam berkominikasi.

Berdasarkan penjelasan di atas indikator pengukuran transparansi yaitu, informasi yang mudah dipahami dan diakses. Adanya publikasi melalui media mengenai proses kegiatan dan laporan keuangan. Adanya laporan berkala dan tahunan. Adanya website atau media publikasi organisasi. Serta pedoman dalam penyebaran informasi.

Terdapat beragam klasifikasi transparansi menurut beberapa ahli yang berbeda. Di dalam penelitian ini penulis mengacu kepada Nasim dan Romdhon (2016). Indikator pengukuran transparansi disampaikan sesuai dengan organisasi nirlaba dimana adanya ketersediaan informasi untuk masyarakat umum.

Unsur Laporan Keuangan Yayasan

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010 telah menyusun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba. Laporan keuangan tersebut terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. (Halim & Kusufi, 2014)

Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan yaitu suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi atau keadaan keuangan atau kekayaan suatu organisasi atau perusahaan pada periode tertentu. Laporan posisi keuangan mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto.

Laporan aktivitas

Laporan aktivitas terdiri atas dua bagian besar yaitu pendapatan dan beban biaya lembaga. Pendapatan yang berasal dari sumbangan disajikan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, terikat permanen atau terikat teromporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Untuk sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi pada periode yang sama dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi. (Nainggolan, 2005)

Laporan arus kas

Laporan arus kas menunjukkan bagaimana arus kas keluar dan masuk lembaga atau organisasi selama suatu periode tertentu. Laporan arus kas menerangkan bagaimana saldo kas awal lembaga berubah dengan penambahan dan pengurangan hingga mencapai saldo akhir per tanggal neraca. (Nainggolan, 2005). Tujuan laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.

Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Tujuan dari laporan ini adalah untuk memberikan informasi lebih rinci tentang perkiraan-perkiraan yang dinyatakan dalam laporan keuangan. (Nainggolan, 2005)

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang penulis lakukan di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A'yun (YPDIWU-QA) Batusangkar. Adapun metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dimana metode ini mendeskripsikan dan mengeksplorasi tentang akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A'yun Batusangkar

Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Asas hukum juga menjadi pedoman dalam menjalankan tugas oleh pengurus Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A'yun Batusangkar. Pengurus Yayasan diwajibkan untuk mematuhi norma dan aturan dalam pengelolaan Yayasan, melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan secara tegas, melakukan pengelolaan Yayasan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dan melakukan segala upaya yang benar dan etis untuk mengelola Yayasan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan diterapkan sepenuhnya secara tidak berpihak dan adil; dan menjaga dan memelihara tertib hukum dan tertib sosial dalam pengelolaan Yayasan.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Yayasan diperoleh informasi bahwa dalam pengelolaan dana Yayasan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu penggunaan dana sesuai dengan juknis BOS dan peraturan yang dibuat oleh yayasan yaitu penggunaan dana sesuai dengan SOP yayasan. Contoh Juknis BOS dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dalam Pasal 9A selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 sekolah dapat menggunakan dana BOS untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring. Hal ini sudah di realisasikan oleh unit SDIT Qurrata A'yun Batusangkar dengan memberikan dana pulsa untuk pembelajaran daring. Selanjutnya salah satu contoh penggunaan dana yayasan adalah pembayaran gaji dan operasional unit bisa dicairkan jika mengikuti SOP bulanan yayasan.

Kutipan wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam konteks penggunaan dana kita sangat relatif sesuai dengan operasional kita atau kebutuhan unit. Tetapi prinsip penggunaan dana yayasan yang diberikan oleh pemerintah sudah kita ikuti mana yang boleh digunakan mana yang tidak sudah kita ikuti." (Wawancara dengan Ketua Yayasan pada tanggal 11 Juli 2020)

Berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi dalam pengelolaan keuangan Yayasan maka dana bisa dicairkan apabila sudah mendapat otorisasi dari ketua Yayasan. Yang bisa mencairkan dana tersebut adalah bendahara Yayasan. Kutipan wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

“Yang berhak mengotorisasi pencairan dana yayaan hanya satu yaitu yayasan dan bendahara hanya membayarkan sesuai dengan yang disetujui oleh ketua yayasan.” (Wawancara dengan Ketua Yayasan pada tanggal 11 Juli 2020)

Hal tersebut juga disampaikan oleh bendahara Yayasan bahwa dana selama ini bisa dilakukan apabila sudah diotorisasi oleh ketua yayasan. Kutipan wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

“Sejauh ini pencairan dana sudah berdasarkan persetujuan dari ketua.” (Wawancara dengan Bendahara Yayasan pada tanggal 05 Juli 2020)

Selanjutnya, penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi oleh pengurus yayasan dalam pengelolaan pertama berasaskan pada syariat Islam, dimana dalam melaksanakan asas syariat Islam pengurus yayasan menjunjung tinggi sifat shiddiq atau kejujuran yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan organisasi. Kedua berasaskan Pancasila. Ketiga berasaskan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan; dan menjunjung tinggi kepentingan agama, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akuntabilitas Manajerial

Ketua dan Pengurus yayasan dalam pengelolaan keuangan yayasan sudah melakukan yang terbaik atau memanfaatkan secara maksimal dana yang tersedia seperti dana dari spp, pembangunan, infak, sedekah dan wakaf untuk memberikan kepuasan layanan kepada stakeholder secara efektif dan efisien. Serta yayasan pendidikan dan dakwah Islam wihdatul ummah qurrata a’yun Batusangkar membuat aturan yang jelas terkait mekanisme pengeluaran untuk meminimalisir pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu Ini berdasarkan kutipan wawancara dengan ketua yayasan sebagai berikut:

“Kalau sejauh ini kita melihat dengan dana yang ada kemudian pemanfaatannya setidaknya sudah efektifya, walaupun belum ideal pertama sekali lagi yang dominan penggunaan kita kalau dari spp itu adalah untuk gaji guru kemudian sebagian kecilnya untuk sarana dan prasarana dan kebutuhan atk. Kemudian uang pembangunan memang kita gunakan untuk membangun sarana-sarana seperti gedung. disamping juga ditambah lagi dengan dana lain seperti infak, sedekah dan wakaf. Dengan dana yang ada yang masuk setidaknya sudah efektif walaupun belum ideal terutama dalam konteks pengajian guru tetapi tentu kita sudah memanfaatkan secara maksimal dana yang tersedia.” (Wawancara dengan Ketua Yayasan pada tanggal 11 Juli 2020)

Dari tiga stakeholder yang diwawancarai tentang kepuasan pelayanan yang diberikan oleh yayasan semuanya berpendapat bahwa pelayanan yang mereka dapatkan sudah cukup baik seperti sarana yang bagus. Salah satu kutipan wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

“Dilihat dari luar pengelolaan sudah bagus yah, dilihat dari perkembangan di qurrata ayun seperti gedung sampai pembelian tanah di daerah Rambatan. Kalau pengelolaan dananya tidak bagus tentu tidak mungkin seperti itu. perkembangan yayasan cukup pesat dibandingkan dengan yang lain perkembangan tidak secepat itu. Saya lihat beberapa tahun udah berkembang kalau pengelolaan tidak bagus tentu tidak secepat itu.” (Wawancara dengan Informan 01 pada tanggal 08 Juli 2020)

Akuntabilitas Program

Yayasan dalam melaksanakan program atau kegiatan di bagian keuangan untuk pengembangan sarana dan unit sudah tercapai sesuai target dan ada pembangunan sarana yang sudah melebihi dari target. Salah satu contohnya adalah pengembangan unit SDIT 2 Lintau baik dari segi target penerimaan murid baru serta pembangunan sarana gedung.

Yayasan dalam melaksanakan program atau kegiatan sudah berdasarkan visi yaitu “Mebina Generasi Qurani”. Ini terlihat dari program yayasan baik kegiatan dari bidang dakwah dan bidang pendidikan salah satunya sebagai berikut:

Disetiap unit di terapkan berpakaian Islami baik dari murid maupun tenaga pengajar.

- a. Adanya target hafalan Quran di setiap unit. Untuk tingkat SDIT minimal 2 juz dan SMPIT 5 juz.
- b. Adanya kegiatan tahsin untuk memperbaiki bacaan quran untuk tenaga pengaja
- c. Adanya kelas tahsin untuk orang tua
- d. Adanya kegiatan parenting Islami
- e. Adanya acara wisuda tahfiz dan khatam al-quran

Tetapi terkait dengan hafalan anak berdasarkan wawancara dengan infroman 02 bahwa untuk target hafalan anak kurang maksimal karena anak hanya hafal di saat akan setoran hafalan saja, setelah itu anak tidak hafala lagi. Untuk itu sekolah di yayasan hendaknya meningkatkan murajaah hafalan anak di sekolah

Akuntabilitas Kebijakan

Kebijakan yang dikeluarkan oleh yayasan pendidikan dan dakwah Islam wihdatul ummah qurrata a'yun Batusangkar terkait dengan kebijakan keuangan yang ditetapkan oleh yayasan terhadap stakeholders tentang jumlah iuran SPP dan iuran pembangunan selama ini orang tua murid belum ada yang keberatan. Terkait dengan kebijakan atau program keuangan seperti gerakan wakaf Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) belum ada orang tua murid yang komplain.

Selanjutnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh yayasan pendidikan dan dakwah Islam wihdatul ummah qurrata a'yun Batusangkar juga disinkronisasikan dengan visi/misi yayasan. Hal ini bertujuan untuk optimalisasi pengelolaan yayaasan. Dalam menetapkan pengambilan kebijakan di yayasan dilaksanakan melalui musyawarah oleh semua pengurus yayasan, hasil dari musyawarah baru akan disampaikan kepihak terkait. Berdasarkan wawancara dengan ketua yayasan salah satu kebijakan yang kurang diterima oleh wali murid adalah tentang penetapan anak di sekolah SDIT Qurrata A'yun 1 Batusangkar yang di kampus 2 dengan salah satu alasan sekolah SDIT kampus 2 lokasinya jauh. Dalam memindahkan atau menetapkan siswa di kampus 2 SDIT Qurrata A'yun, yayasan sudah memusyawarahkan dengan pertimbangan yang cukup komprehensif baik dari lokasi tempat tinggal orang tua murid, tempat kerja orang tua murid dan saudara murid yang ada di kelas atas atau kelas tingi.

Akuntabilitas Finansial

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan yayasan ke arah yang lebih baik. Setelah melewati rangkaian proses tahapan perekrutan, diangkatlah satu orang di bagian akuntansi. Dengan diangkatnya seorang tenaga pelaksana di bidang Akuntansi, diharapkan pengelolaan keuangan semakin akuntabel dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dengan bendahara, yayasan dalam melaksanakan akuntabilitas finansial telah membuat laporan keuangan yang mengacu kepada pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No 45.

Saat penelitian ini dilakukan, bagian keuangan yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A'yun Batusangkar telah menyusun tata cara pembukuan laporan dalam format yang baik. Hal ini dapat dilihat dari laporan yang disediakan oleh bagian keuangan yayasan secara periodik. Setiap bulan bagian keuangan membuat laporan keuangan. Dimana, sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh yayasan, laporan yang disajikan terdiri atas laporan keuangan dan laporan bulanan. Laporan keuangan mengacu kepada PSAK 45. Laporan keuangan diterbitkan setiap

6 (enam) bulanan dan tahunan yang terbit selambat-lambatnya tanggal 31 Juli tahun berjalan dan laporan keuangan tahunan terbit selambat-lambatnya 30 Maret tahun berikutnya.

Berdasarkan wawancara dengan ketua yayasan, diperoleh informasi bahwa yayasan pendidikan dan dakwah Islam wihdatul ummah qurrata a'yun Batusangkar belum pernah di audit. Sejauh ini audit belum pernah dilakukan terhadap yayasan (wawancara dengan ketua yayasan):

“Sejauh ini kita belum melihat urgensinya, disamping kita tentu juga melakukan pembenahan secara internal dulu, pengelolaan keuangan. Nanti setelah kita siap pembenahan internal baru kita akan mencoba melakukan audit secara eksternal. Disamping kita juga melihat urgensi dan dampak strategisnya terhadap pengelolaan keuangan yayasan.”

Jadi, akuntabilitas di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A'yun Batusangkar dapat diringkaskan seagai berikut.

Tabel 4. 1
Akuntabilitas di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam
Wihdatul Ummah Qurrata A'yun Batusangkar

Indikator	Keterangan
Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran	Pengelolaan dana yayasan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah dan aturan yayasan. Untuk penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi dalam pengelolaan keuangan yayasan maka dana bisa dicairkan apabila sudah mendapat otorisasi dari ketua yayasan.
Akuntabilitas Manajerial	Ketua dan Pengurus yayasan dalam pengelolaan keuangan yayasan sudah melakukan yang terbaik atau memanfaatkan secara maskimal dana yang tersedia.
Akuntabilitas Program	Yayasan dalam melaksanakan program atau kegiatan sudah berdasarkan visi dan misi.
Akuntabilitas Kebijakan	Dalam menetapkan pengambilan kebijakan di yayasan dilaksanakan melalui musyawarah oleh semua pengurus yayasan, hasil dari musyawarah baru akan disampaikan kepihak terkait.
Akuntabilitas Finansial	Yayasan dalam melaksanakan akuntabilitas finansial telah membuat laporan keuangan yang mengacu kepada pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No 45

Transparansi di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A'yun Batusangkar

Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses.

Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A'yun Batusangkar memanfaatkan media massa yang ada, dalam menginformasikan kegiatan yang dijalankan termasuk bekerjasama dengan unit dan para wali kelas untuk menyampaikan informasi kepada *stakeholders* atau orang tua murid melalui media online yaitu whatsapp dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang tua murid. Salah satu contoh yaitu wali kelas TKIT-QA lokal Kasih sayang menyampaikan pesan kepada orang tua murid tentang syarat pengambilan rapor dan ijazah siswa. Dengan isi pesan sebagai berikut:

“Assalamu’alaikum Ayah dan Bunda yang dirahmati Allah.. sehubungan dengan telah berakhirnya ajaran 2019/2020. Maka kami undang ayah bunda untuk datang kesekolah mengambil laoran perkembangan anak kita di semester 2 dan ijazahnya pada hari selasa 16 juni 2020 di lokal kasih sayang. Karena saat ini masih dalam masa pandemi, maka jadwal pengambilan rapor dan ijazah anak dibatasi 10 orang/lokal. Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian ayah bunda, kami ucapkan terima kasih... wassalam. NB: syarat pengambilan rapor dan ijazah adalah melunasi SPP juni (Rp 185.000, -), ijazah sebesar (Rp 20.000, -), dan kewajiban lainnya bagi yang belum lunas.” (Isi pesan Whatsap wali kelas kasih sayang TKIT-QA kepada orang tua murid)

Adanya publikasi melalui media mengenai proses kegiatan dan laporan keuangan

Berdasarkan wawancara dengan ketua yayasan bahwa publikasi kegiatan melalui media sosial dimanfaatkan media Facebook. Dan untuk publikasi laporan keuangan yayasan belum pernah dipublikasikan melalui media masa, melainkan hanya disampaikan secara lisan saja kepada *stakeholders* atau orang tua murid pada acara rapat atau pertemuan dengan orang tua murid. Berikut kegiatan parenting webinar yang dilaksanakan oleh yayasan untuk semua unit mulai dari TAAM-KB, TKIT, SDIT, dan SMPIT Qurrata A'yun dengan tema “*Menumbuhkan Karakter Tangguh Pada Anak Di Masa New Normal*” pada hari minggu 5 Juli 2020 yang dipublikasikan melalui media facebook.

Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya yang dapat diakses oleh umum

Berdasarkan wawancara dengan ketua yayasan bahwa belum ada laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya yang dapat diakses oleh umum. Tetapi apabila ada *stakeholders* yang ingin mendapatkan informasi maka akan disampaikan. Sejauh ini penyampaian secara lisan sudah disampaikan kepada *stakeholders* atau orang tua murid.

Yayasan juga memfasilitasi pengaduan dari *Stakeholders* atau orang tua murid. Mekanisme untuk pengaduan tersebut *Stakeholders* atau orang tua murid dapat langsung datang ke kantor unit sekolah dan bisa langsung ke kantor yayasan atau menghubungi pengurus, staf yayasan via telpon maupun media sosial lain yang dimiliki oleh yayasan. Pengurus yayasan selalu tanggap terhadap permasalahan maupun pengaduan dari *Stakeholders* atau orang tua murid dan langsung bertemu dengan orang yang bersangkutan. Sejauh ini, belum ada kritikan tertulis yang diterima oleh yayasan, namun secara langsung ada beberapa wali murid yang datang menemui pengurus untuk menanyakan dan komplain karena orang tua tersebut tidak terima dengan penetapan anak mereka di kampus 2 SDIT-QA Batusangkar.

Laporan tahunan

Adanya aturan dalam pembuatan laporan keuangan yayasan berdasarkan PSAK 45, tahun 2019 laporan keuangan yayasan wihdatul Ummah Qurrata A'yun Batusangkar secara format telah menerapkan laporan keuangan sebagaimana disyaratkan dalam PSAK No. 45 yang terdiri dari:

a. Laporan Posisi Keuangan

Berdasarkan informasi dari Bendahara yayasan penyajian laporan posisi keuangan yang disusun oleh yayasan Wihdatul Ummah Qurrata A'yun Batusangkar telah memberikan informasi mengenai penyajian unsur laporan posisi keuangan (aktiva, kewajiban, dan aset neto) dan sudah sesuai dengan format yang disediakan oleh PSAK 45.

b. Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas terdiri atas dua bagian besar yaitu pendapatan dan beban biaya lembaga. Laporan aktivitas yang disajikan oleh Yayasan Wohdatul Ummah Qurrata A'yun Batusangkar sudah sesuai dengan format yang disediakan oleh PSAK 45.

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas pada Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A'yun Batusangkar disusun untuk melengkapi dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan Yayasan. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan pada akhir tahun. Arus kas masuk dan arus kas keluar diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi, dan pendanaan selama periode akuntansi.

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan rincian atau penjelasan detail dari laporan keuangan sebelumnya. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi bagi para pengguna laporan mengenai: gambaran umum lembaga, ikhtisar kebijakan akuntansi, dan penjelasan atas pos-pos keuangan.

Adapun laporan keuangan Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A'yun Batusangkar secara format telah menerapkan laporan keuangan sebagaimana disyaratkan dalam PSAK No. 45 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Di dalam syariat Islam adanya kewajiban bagi umat muslim untuk mencatat atau menulis setiap kejadian ekonomi yang ada. perintah ini terdapat dalam Al-quran surat Al-baqarah ayat 282. Tujuan ayat tersebut adalah untuk menjaga keadilan dan kebenaran dimana hal ini ditekankan pada kepentingan transparansi agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak ada yang dirugikan. Yayasan pendidikan dan dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A'yun Batusangkar sudah mencatat kejadian ekonomi dimana sudah ada laporan keuangan yang sudah mengacu kepada PSAK Nomor 45.

Website atau media publikasi organisasi.

Terkait dengan website yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A'yun Batusangkar belum mempunyai website sendiri. Tetapi yayasan memiliki media publikasi seperti facebook dan instagram. Ini berdasarkan hasil wawancara dengan ketua yayasan. Berikut kutipan wawancara

“Website memang masih belum tuntas, tapi kita memang akan mencoba membuat website yang ideal dan juga bisa menampung unit-unit yang ada didalamnya. Tapi ini masih belum selesai, baru akan kita proses dan publik bisa mengakses perkembangan dan segala sesuatu tentang yayasan dan sekolah melalui website.” (Wawancara dengan Ketua Yayasan pada tanggal 11 Juli 2020)

Pedoman dalam penyebaran informasi.

Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A'yun Batusangkar dalam menyampaikan informasi berpedoman kepada aturan yang berlaku seperti pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi, transparansi di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A'yun Batusangkar dapat diringkaskan seagai berikut.

Tabel 4. 2
Transparansi di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam
Wihdatul Ummah Qurrata A'yun Batusangkar

Indikator	Keterangan
1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses.	1. Informasi yang disampaikan oleh yayasan disesuaikan dengan <i>stakeholders</i> sehingga mudah dipahami
2. Adanya publikasi melalui media mengenai proses kegiatan dan laporan keuangan	2. Publikasi kegiatan melalui media sosial dimanfaatkan media Facebook. Dan untuk publikasi laporan keuangan yayasan belum pernah dipublikasikan melalui media masa
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya yang dapat diakses oleh umum	3. Belum ada laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya yang dapat diakses oleh umum
4. Laporan Tahunan	4. Yayasan wihdatul Ummah Qurrata A'yun Batusangkar secara format telah menerapkan laporan keuangan sebagaimana disyaratkan dalam PSAK No. 45 dan telah dilaporkan sesuai periode akuntansi.
5. Website atau media publikasi organisasi.	5. Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A'yun Batusangkar belum mempunyai website sendiri. Tetapi yayasan memiliki media publikasi seperti facebok dan instagram.

6. Pedoman dalam penyebaran informasi.	6. Berpedoman kepada aturan yang berlaku.
--	---

Pandangan Stakeholders terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A'yun Batusangkar

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Stakeholders* (informan 01, 02, dan 03) diperoleh informasi bahwa untuk akuntabilitas dan transparansi sudah cukup dilaksanakan oleh yayasan walaupun masih belum semua indikator terpenuhi. Berikut pandangan *Stakeholders* terhadap pengelolaan yayasan.

Informan 01 berpandangan bahwa:

"Untuk besaran SPP untuk sekolah anak menurut saya itu berupa wakaf dimana nanti pahalanya akan mengalir. Karena di qurrata a'yun bagus menurut saya. Dan saya yakin penggelolanya cukup kredibel di agama jadi saya percaya aja"

Informan 02 berpandangan bahwa :

"tidak adanya laporan keuangan saya sudah percaya karena sekolah swasta jadi sudah berfikir membutuhkan biaya cukup besar. Termasuk karena kita mendapatkan manfaat atau feedback secara langsung rasanya nggak perlu dilaporkan oleh yayasan"

Dari hasil wawancara tersebut *Stakeholders* percaya bahwa pengurus yang ada di yayasan telah memiliki standar kualifikasi yang memenuhi untuk menjadi pengurus. Salah satu aset berharga yang menjadi nilai lebih dimata donator dalam meningkatkan reputasi tersebut, yaitu adanya etika organisasi, dimana pengurus berkomitmen untuk berperilaku etis dalam menjalankan tugasnya. Adapun kode etik tersebut terdiri atas Al Quran dan Sunnah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan yayasan yang akuntabel dan transparan oleh yayasan pendidikan dan dakwah Islam wihdatul ummah qurrata a'yun Batusangkar telah menumbuhkan kepercayaan *Stakeholders* terhadap yayasan.

Stakeholders percaya memberikan sumbangan dan dana wakaf kepada Yayasan Wihdatul Ummah Qurrata A'yun Batusangkar karena profil pengurus yayasan yang kredibel di agama. Serta *Stakeholders* berpandangan bahwa jika kita memberi sumbangan cukup mengharap pahala dari Allah SWT. Terkait dengan laporan keuangan *Stakeholders* tidak begitu penting karena *Stakeholders* memegang pepatah *"jika tangan kanan memberi sebaiknya tangan kiri tidak tahu"*. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

"Ada tujuh golongan yang akan dinaungi Allah SWT dalam naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan selain naungan-Nya. Di antaranya, seorang yang mengeluarkan suatu sedekah, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya." (Hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim)

Penerapan akuntabilitas dan transparansi penting untuk sebuah organisasi atau yayasan guna keberlangsungan yayasan. Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A'yun Batusangkar sudah menjalankan akuntabilitas dengan baik dan transparansi yang perlu diterapkan lebih maksimal lagi. Seperti yang disampaikan oleh Informan 03 sebagai berikut:

“Sebaiknya laporan keuangan di bagian-bagian tertentu perlu dilaporkan supaya orang tua murid tau kenapa SPP bisa sebesar itu. Laporan sebaiknya di expose karena sudah banyak pesaing (sekolah swasta di daerah Tanah Datar). Laporan minimal ketika rapat orang tua murid dilaporkan atau saat menerima rapor siswa. Seharusnya laporan yayasan di expose berdasarkan ketentuan PSAK.” (Wawancara dengan Informan 03 pada tanggal 10 Juli 2020)

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A'yun Batusangkar telah melaksanakan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sesuai dengan indikator yang dikembangkan oleh Mahmudi (2015) baik akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial.
2. Transparansi yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A'yun Batusangkar belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi. Saat ini, dari 6 (enam) indikator prinsip transparansi terdapat 3 (tiga) indikator prinsip transparansi yang belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A'yun Batusangkaryaitu laporan keuangan yayasan belum pernah dipublikasikan melalui media masa. Belum ada laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya yang dapat diakses oleh umum. Serta belum mempunyai website sendiri.
3. *Stakeholders* berpandangan terhadap pengelolaan yayasan bahwa pengurus cukup baik dalam melakukan pengelolaan terhadap yayasan serta *Stakeholders* percaya memberikan sumbangan dan dana wakaf kepada Yayasan Wihdatul Ummah Qurrata A'yun Batusangkar karena profil pengurus yayasan yang kredibel atau taat melaksanakan perintah Agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, N. (2007). *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Albugis, F. F. (2016). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Vol.4 No.3 ISSN 2303-1174 September.
- Benawan, dkk. (2018). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan). *Jurnal Riset Going Concern* 13 (3).
- Coryanata, I. (2012). Akuntabilitas, Patisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vol.12., No. 2 Juli, 110-125.
- Halim dan Kusufi. (2012). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sewktor Publik. Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim dan Kusufi. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.
- IAI. (2010). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Akuntansi Sektor Publik*
- Jubaedah., dkk. (2008). *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Bandung: PKP2AI LAN.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STI Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Maries., dkk. (2017). Menelaah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Yayasan Pendidikan Full Day Mardlatillah Singaraja. *e-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 7., No. 1.
- Nainggolan, P. (2005). *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasim dan Romdhon. (2016). Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Bandung). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2., No. 3, 601.
- Putri., dkk. (2016). Implementasi Akuntabilitas Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus: BAZNAS Kabupaten Agam). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* Vol. 11, No.2
- Setia, R. (2016). Akuntabilitas Pendidikan Islam. *I'TIBAR.*, Vol. 03., No. 06 , 71-85.
- Simamora, Y. S. (2012). Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Volume 1 Nomor 2.
- Sukmawati dan Nurfitriani. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM*. Vol.2, No.1, Juni.
- Sutedi, A. (2012). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Waluyo. (2007). Manajemen Publik. Bandung: Mandar Maju.

Yulianto dan Krista. (2006). Pengantar Bisnis Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat.

Zulfahmi., dkk. (2016). Analisis Akuntabilitas Keuangan pada Kantor Kementerian Agama Dalam Wilayah Provinsi Aceh. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi. Vol. 9, No.2, ISSN 1693-3397 Juli.